

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI ERA OTONOMI DAERAH**

**{ Studi Kasus Implementasi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung }**

TESIS

Oleh :

KHAMSIARDI

07 202 008



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009



**“Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah
{Studi Kasus Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Lubuk Tarok
Kabupaten Sijunjung }”**

Oleh : Khamsiardi

(dibawah bimbingan DR.Erwin,M.Si dan DR.Asmawi,MS)

RINGKASAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama di banyak negara. Negara seringkali menjadikan kemiskinan sebagai isu utama yang menjadi agenda utama dalam program kerja negaranya, tidak terkecuali Indonesia, yang menjadikan persoalan kemiskinan sebagai masalah utama yang menjadi program, dengan harapan agar bangsa bebas dari kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, dengan meluncurkan program-program pemberdayaan yang tujuan utamanya adalah menanggulangi kemiskinan. Program-program tersebut seperti : Transmigrasi, KIK, KUK, KCK, PKT, Inpres Desa Tertinggal (IDT), P3DT, PDM-DKE, PPK, P2KP, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan. Kecamatan Lubuk Tarok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sijunjung yang menerima PNPM-MP untuk tahun 2008.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PNPM-MP di Kecamatan Lubuk Tarok, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM-Mp, sert untuk mengetahui dampak PNPM-MP bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Tarok.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang saat ini sangat populer, karena kepopulerannya itulah, tidak jarang kemiskinan dijadikan komoditi politik bagi sebagian orang untuk berbagai tujuan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, baik itu negara kaya, berkembang maupun negara miskin. Pemerintah di banyak negara menjadikan kemiskinan sebagai isu utama yang menjadi agenda utama dalam program kerja negaranya, tidak terkecuali Indonesia, yang menjadikan persoalan kemiskinan sebagai masalah utama yang menjadi program, dengan harapan agar bangsa bebas dari kemiskinan.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase

penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, dengan meluncurkan program-program pemberdayaan yang tujuan utamanya adalah menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut telah dimulai sejak periode tahun 1974-1988; Pemerintah meluncurkan program seperti: Bimas, Inmas, Transmigrasi, KIK, KUK, KCK. Namun semuanya belum ada kebijakan yang secara khusus berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. Kemudian periode tahun 1988-1994; kembali Pemerintah Indonesia menghadirkan program seperti; PKT, Inpres Desa Tertinggal, tapi toh juga masih ditemui beberapa kelemahan; diantaranya peran pemerintah masih sangat dominan dan wilayah-wilayah perkotaan belum tersentuh sama sekali. Periode 1994-1998; pada periode ini mulailah diletakkan dasar program yang berorientasi khusus pada program pemberdayaan masyarakat, misalnya : Padat Karya, Inpres Desa Tertinggal (IDT), P3DT (Program Pengadaan Prasarana Desa Tertinggal), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM).

Untuk periode tahun 1998-2005, mulailah dikembangkan program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Sebut saja Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Selain itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mendukung program tersebut dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Strategi Nasional

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi PNPM-MP di Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung secara umum berjalan dengan baik, ini terlihat dari dampak dan manfaat yang telah dicapai. Selain itu jika dilihat dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip program yang dilaksanakan, secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti pemanfaatan dana simpan pinjam bukan untuk kegiatan yang produktif.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM-MP di Kecamatan Lubuk Tarok, yaitu : faktor ketersediaan sumber daya, faktor komunikasi, faktor disposisi serta faktor struktu birokrasi.
3. Setelah berjalan sejak awal 2008, PNPM-MP memberikan hasil-hasil yang memberikan dampak dan manfaat terhadap masyarakat di Kecamatan Lubuk Tarok, seperti : berjalannya proses pembelajaran kritis bagi masyarakat, Hal lain terlihat dari berupa sarana dan prasarana yang dibangun, meningkatnya kesejahteraan masarakat yang diringi dengan adanya indikasi penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kecamatan Lubuk Tarok dari 27,2 % pada tahun 2007 menjadi 26,3 % pada akhir tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arikunto, Suharsimi, 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta : Rineka Cipta
- Dunn, William N., 2000. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Irawan, Prasetya, 2000, **Logika dan Prosedur Penelitian**, STIA LAN, Jakarta.
- Islamy, Irfan M, 1994, **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles O., 1994. **Pengantar Kebijakan Publik**, Diterjemahkan oleh Ricky Istamto, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. **Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan**, Jakarta : Pustaka Cidessindo.
- Kerlinger, Fred N., dan Elazar J. Pedhazur, 1987. **Korelasi dan Analisis Regresi Ganda (multiple) dalam Riset Perilaku**, Diterjemahkan oleh A. Taufik, Semarang : Nurcahaya.
- Nazir, Moh., 1999. **Metode Penelitian**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2009. **Public Policy**, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S. 1996 **Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi**, Jakarta : CSIS.
- Rasyid, Harun Al, 1994. **Statistika Sosial. Bandung** : Program Pasca Sarjana - UNPAD.
- Rukminto A, Isbandi, 2008. **Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat**, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber, 2006. **Metode Penelitian Sosial**, Bandung : Unpar Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi , 1989. **Metode Penelitian Survey**, Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono, 2006. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Bandung : Alfabeta.